

Nama : Teguh Agung Prabowo

NIM : 512121230007

Jurusan : Sistem Informasi

Matkul : UTS - E Government

1. Istilah e-Government di Indonesia terus naik daun sejak milenium baru dimulai. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 yang mendorong penggunaan teknologi telematika guna menyukseskan target good governance serta mengakselerasi terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan.

Secara pengertian, e-Government (atau sering disingkat menjadi e-Gov) sendiri merupakan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan interkoneksi antara pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pada awal pengembangan, banyak yang mengira bahwa e-Gov hanyalah situs web lembaga pemerintah, padahal sistem ini tidak sesempit itu. Persepsi ini ditakutkan akan mereduksi makna dari e-Gov itu sendiri. e-Government merupakan sebuah kesatuan sistem yang terintegrasi antarinstansi di dalam suatu negara.

Karena namanya yang tergolong modern, kemudian muncul pihak-pihak yang beranggapan bahwa e-Gov terbatas pada ketersediaan infrastruktur. Nyatanya, e-Gov tidak bisa diidentikkan dengan infrastruktur. Sifatnya yang "lunak" membuat e-Gov lebih condong ke arah menumbuhkan pemberdayaan, sedangkan infrastruktur umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Karena hal ini, maka kehadiran IT konsultan menjadi penting.

Setelah itu, muncul keraguan bahwa e-Gov terbatas pada pembangunan sistem informasi. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi selama ini pandangan instansi di Indonesia terhadap sistem terlanjur berfokus pada proses birokrasi yang kesannya

berjalan sendiri-sendiri. Pemahaman lebih tepat adalah sistem ini ada karena digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa optimal.

Dengan target cakupan yang besar, kendala lain buat e-Gov di Indonesia adalah kesan "mahal". Sebenarnya, minimnya biaya bukan merupakan halangan untuk sukseskan e-Gov, melainkan menjadi salah satu fakta lapangan. Hal yang lebih penting dari sekadar biaya sebenarnya ada pada masalah perbedaan tingkat kesiapan di level masyarakat dalam menerima teknologi yang diterapkan di e-Gov. Selain itu, sistem ini justru bisa disebut mahal kalau berbagai aspek investasi pendukungnya (termasuk infrastruktur dan sistem informasinya) tidak bisa memenuhi target. e-Gov bakal efektif apabila implementasi TIK-nya mampu menciptakan multiplier effect yang menghasilkan output kemanfaatan lebih besar dari nilai investasi.

2. Infrastruktur dan suprastruktur Indonesia saat ini sudah mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Infrastruktur pemerintah elektronik ialah dalam hal pengaman elektronik, topologi serta portal pemerintahan. Dengan kata lain infrastruktur itu berbasiskan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan internet.

sedangkan yang dimaksud dengan suprastruktur e-government berkaitan dengan kepemimpinan dalam bentuk e-leadership, sumber daya manusia yang berkualitas serta aturan-aturan yang ada dalam sebuah lembaga. Dengan kata lain, suprastruktur ini adalah sebagai alat untuk mendukung infrastruktur e-government.

Peran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur dan suprastruktur yang ideal di Indonesia yaitu:

a. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini sudah mengalami banyak sekali perubahan, baik itu dari perilaku masyarakatnya ataupun pola hidup. Perubahan ini dilatarbelakangi dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang yang mengarahkan masyarakatnya untuk menjadi lebih modern. Hal ini bisa dibuktikan dengan kemampuan

indonesia dalam hal menciptakan alat-alat teknologi terbaru yang canggih seperti hp, laptop, televisi dan lain sebagainya. kemajuan ini selain menguntungkan bagi negara tetapi juga menurunkan sifat kesosialan dalam masyarakatnya sendiri. Keuntungannya yakni pemerintah bisa lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya serta memantau perkembangan rakyatnya. Namun juga menimbulkan dampak negatif. Seperti halnya Hp, sekalipun mempermudah orang untuk berkomunikasi jarak jauh tapi Hp juga menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu menjauhkan orang yang ada didekat. Banyak orang yang ketika bertemu saat ini, bukan mengobrol secara intens melainkan akan berfokus pada Hp nya masing-masing, dan sibuk dengan kegiatannya sendiri.

b. Ekonomi

Peran pemerintah dalam segi ekonomi adalah dengan cara memanfaatkan sistem e-commerce (Perdagangan elektronik) di Indonesia. Sistem e-commerce ini merupakan salah satu bagian dari e-bussiness. E-Commerce itu sendiri adalah sebuah kegiatan/aktifitas bisnis dengan cara memanfaatkan sistem internet. Sejauh ini perkembangan penggunaan e-commerce di indonesia sudah cukup baik. Salah satu contoh aplikasi yang merupakan bagian dari e-commerce adalah aplikasi tokopedia atau shopee. Masyarakat sekarang ini lebih banyak menjual/membeli suatu barang dengan menggunakan aplikasi tokopedia/shopee. Karena menurut mereka hal itu lebih efektif dan efisien,

keuntungan yang didapat dari bisnis e-commerce ini pun sangat menguntungkan. Untuk segi waktu dan tempat nya pun lebih efisien. Dari sisi pengguna/konsumen pun, masyarakat sendiri sudah banyak yang menggunakan sistem ini. Dengan demikian hal tersebut akan semakin menguntungkan berbagai pihak, baik itu masyarakatnya ataupun pemerintah.

c. Kondisi Geografis

Sekalipun indonesia adalah wilayah kepulauan yang artinya terpisah-pisah daerahnya, namun tetap saja hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk indonesia

menerapkan sistem e-government. Dengan adanya sistem e-government ini akan semakin mempermudah pemerintah dalam hal pemantauan serta komunikasi antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang ada di wilayah lain yang jaraknya sangat jauh seperti wilayah timur Indonesia. Dari masyarakatnya pun harus diberikan pelatihan dan informasi mengenai tata cara penggunaan sistem elektronik tersebut. Dengan begitu antara pemerintah dan masyarakat akan terjadi timbal balik yang positif. Disertakan pula dengan infrastruktur dan suprastruktur yang baik dan berkualitas.

3. Manfaat yang dapat diambil dari implementasi e-government ini, yaitu: Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat batasan waktu dan tempat.

4. Yang seharusnya lebih didahulukan adalah dalam segi Peningkatan Sumber daya manusianya terlebih dahulu. Karena ketika Sumber daya manusia di daerah tersebut sudah terasah dengan baik maka segala aktivitas atau kegiatan yang berbasis teknologi ataupun digital akan terlaksanakan dengan baik. Begitupun dalam Pemerintahan, ketika Sumber Daya manusia yang bekerja di pemerintahan memiliki kualitas yang baik maka segala permasalahan atau urusan pemerintahan dapat diselesaikan secara baik dan efisien dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada.

5. E-Government adalah sistem pemerintahan dengan cara memanfaatkan sistem teknologi informasi. E-Government sangatlah diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu masa sekarang ataupun di masa depan. Hal tersebut karena dengan digunakannya sistem e-government suatu negara maka negara atau pemerintahan tersebut akan berjalan dengan baik. Namun haruslah dibarengi dengan Sumber daya manusia, infrastruktur dan suprastruktur yang baik pula. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi secara seksama, karena ketika salah satunya tidak dilakukan, maka akan menyebabkan sedikit gangguan di dalamnya dengan kata lain akan muncul permasalahan lainnya. Maka dari itulah ketiga hal tersebut harus dipenuhi.

Dengan menggunakan sistem e-government juga akan semakin mempermudah segala urusan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi segala urusan dan permasalahan yang muncul. Waktu yang dihabiskan pun akan lebih singkat namun dengan hasil yang sesuai/diharapkan.